

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Oleh:

DESI DELVIANTI NST
165310676

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI
الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email: fekon@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau Menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DESI DELVIANTI NST
NPM : 165310676
Program Studi : Akuntansi S1
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi Kurang dari 30% yaitu 20% pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun dan telah masuk dalam *institution paper repository*, Surat Keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
Ketua Program Studi Akuntansi

Siska, SE., M.Si., Ak., CA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

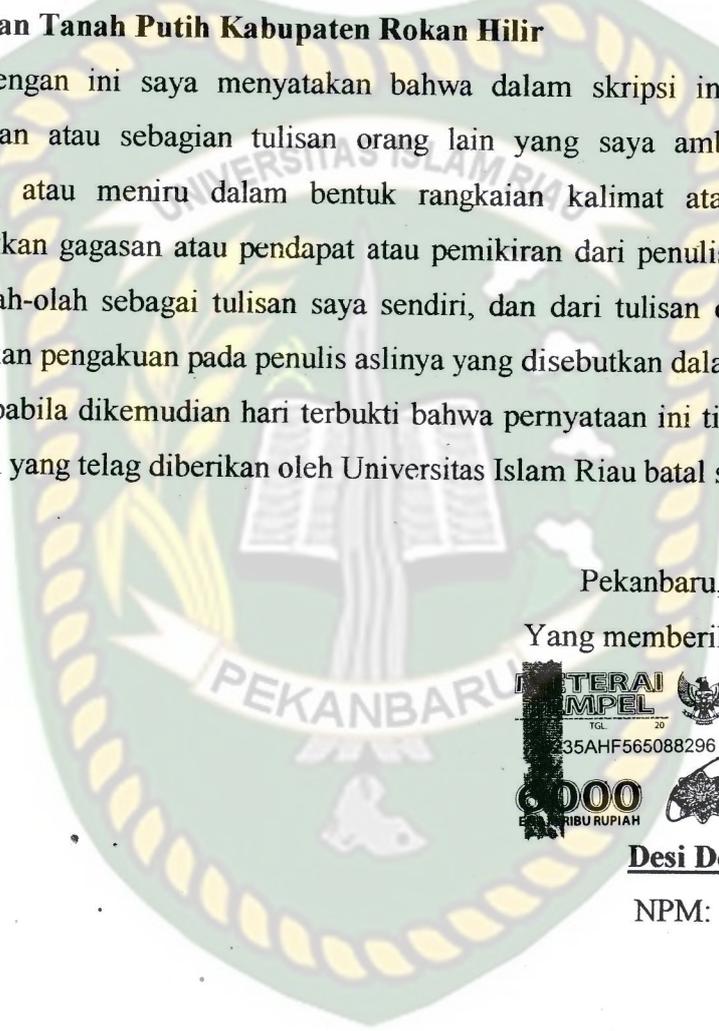
Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya yang disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, gelar dan ijazah yang telag diberikan oleh Universitas Islam Riau batal saya terima.

Pekanbaru, Agustus 2020

Yang memberikan pernyataan,



35AHF565088296



Desi Delvianti Nst

NPM: 165310676

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA
KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

ABSTRAK

Oleh

DESI DELVIANTI NST

165310676

Penelitian ini dilakukan pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada Keuangan Kepenghuluan Rantau Bais Dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara dengan Pengurus Kepenghuluan Rantau Bais mengenai proses pencatatan yang dilakukan oleh Kepenghuluan Rantau Bais dan data sekunder adalah data yang didapat melalui media prantara atau secara tidak langsung yaitu data yang diperoleh seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank Kepenghuluan, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKep dan Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data yang didapatkan, disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Kata Kunci: Siklus Akuntansi dan Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan

**ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING
RANTAU BAIS TANAH PUTIH SUB-DISTRICT, ROKAN HILIR DISTRICT**

ABSTRACT

OLEH

DESI DELVIANTI NST

165310676

This research was conducted at overseas bais Kepenghuanuan, Tanah Putih District, Rokan Hilir Regency. This study aims to determine the suitability of the application of accounting in Raising Bais Finance with General Acceptance Accounting Principles.

The data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the results of interviews with the Raising Bais Supervisory Board regarding the recording process carried out by the Raising Bais Supervisory and secondary data is data obtained through prantara media or indirectly namely data obtained such as General Cash Book, Cash Book of Tax Assistant, Book of Kepenghulan Bank, Report on Realization of APBKe Implementation and Report on the Property of Kepenghuan. Data collection techniques namely by interview and documentation. The data analysis technique was using the Qualitative Descriptive Method.

Based on the results of the analysis of the data obtained, it was concluded that the Application of Financial Accounting in the Rantau Bais Commitment of Tanah Putih District of Rokan Hilir Regency was not in accordance with General Acceptable Accounting Principles.

Keywords: *Accounting Cycles and Statutory Wealth Reports.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, Karena atas nikmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan serta jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak atas bimbingan, dorongan serta semangat yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. Firdaus AR, SE, M.Si.,Ak.,CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
3. Ibu Siska, SE., M.si.,AK selaku ketua jurusan Program studi Ekonomi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang sudah banyak meluangkan pikiran, waktu dan tenaganya bersedia untuk membimbing penulis demi menyempurnakan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuannya selama proses perkuliahan. Semoga Ilmu yang diberikan mendapatkan Keberkahan oleh

Allah SWT, sehingga dapat bermanfaat dikemudian hari. Seluruh Pimpinan, staf Tata usaha, staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Universitas Islam Riau yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Kepada Orang Tua yang tercinta yaitu Bapak ILYAS NASUTION dan Ibu Erna Nita Hayati yang selalu memberikan motivasi, serta Doa yang selalu dipanjatkan agar Penulis Segera Wisuda.
6. Penulis Menyadari bahwa sepenuhnya Penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan, kesempurnaan dan pengalaman penulis, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna menyempurnakan pengetahuan penulis.

Pekanbaru, 9 Mei 2020

Penulis,

DESI DELVIANTI, NST

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	10
2.1 Telaah Pustaka	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi	10
2.1.2 Pengertian Desa.....	11
2.1.3 Pengertian Akuntansi Desa	13
2.1.4 Pengertian Pemerintahan Desa.....	14
2.1.5 Prinsip-Prinsip Akuntansi	15
2.1.6 Sistem Akuntansi	17
2.1.7 Pengguna Akuntansi	18
2.1.8 Siklus Akuntansi Desa	19
2.1.9 Pencatatan Pada Pengelolaan Keuangan Desa.....	20

2.1.10 Karakteristik Akuntansi	22
2.1.11 Pengertian Keuangan Desa	22
2.1.12 Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa	23
2.1.13 Laporan Keuangan Desa	24
2.2 Hipotesis.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Lokasi Penelitian.....	33
3.2 Jenis Data dan Sumber Data	33
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	38
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	53
5.1 Simpulan	53
5.2 Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Format Lampiran Realisasi Anggaran APBKep	26
Tabel II.2 Format Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan	30
Tabel IV.1 Struktur Organisasi Kepenghuluan	36
Tabel IV.2 Tabel Buku Kas Umum	40
Tabel IV.3 Tabel Buku Kas PembantuPajak	42
Tabel IV.4 Tabel Buku Bank	43
Tabel IV.5 Tabel Buku Besar Kas Di Bendahara	44
Tabel IV.6 Tabel Buku Besar Pendapatan Transfer	44
Tabel IV.7 Tabel Buku Besar Pembantu Dana Kepenghuluan	45
Tabel IV.8 Tabel Buku Besar Belanja Operasional Kantor	45
Tabel IV.9 Tabel Buku Besar Belanja MPA	45
Tabel IV.10 Tabel Buku Besar Belanja Pembinaan Masyarakat	45
Tabel IV.11 Tabel Buku Besar Belanja Pegawai	46
Tabel IV.12 Neraca Saldo	46
Tabel IV.13 Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja	49
Tabel IV.14 Tabel Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan	51

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : BUKU KAS UMUM
- LAMPIRAN II : BUKU BANK
- LAMPIRAN III : BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
- LAMPIRAN IV : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
- LAMPIRAN V : LAPORAN KEKAYAAN MILIK KEPENGHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang terdapat batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui didalam sistem pemerintahan nasional yang berada di daerah kabupaten, dan desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang seperti dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan atau administrasinya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal dan usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di dalam APBN setiap tahun. Anggaran yang bersumber dari APBN yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis guna meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Desa memberikan dampak bagi aparat desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penatausahaan keuangan desa. Karena pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal yang harus transparan dan terarah.

Berdasarkan IAI-KASP, 2015 (2-5) pengelolaan keuangan desa meliputi: (1) perencanaan, yaitu rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan badan permusyawaratan desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan oktober. (2) pelaksanaan, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. (3) penatausahaan, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan buku

kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Selanjutnya mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

(4) pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi : laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran. (5) pembinaan dan pengawasan, pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi dari kabupaten/kota kepada desa.

Pemerintah desa juga berusaha untuk memperlihatkan pengelolaan keuangannya dengan baik dan benar secara transparan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan. Karena itu masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa secara langsung.

Akuntansi secara umum adalah proses mencatat, meringkas, mengklasifikasi, mengolah serta menyajikan data dan berguna untuk pengambilan keputusan serta informasi yang menghasilkan laporan yang berisi kegiatan ekonomi dan kondisi suatu entitas, laporan yang dihasilkan adalah laporan keuangan yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Menurut IAI-KASP 2015 (12-13) definisi siklus akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, dan pelaporan yang dimulai saat terjadi sebuah transaksi. Berikut tahapan siklus akuntansi berdasarkan IAI-KASP 2015 :

Siklus pertama pencatatan, merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari, bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai.

Siklus kedua penggolongan, tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokan catatan bukti transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan nilai kedalam kelompok debit dan kredit.

Siklus ketiga pengihktisaran, Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

Siklus keempat pelaporan tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu selanjutnya membuat

Laporan Kekayaan Milik Desa Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kepenghuluan yang terletak di kabupaten Rokan Hilir. Pada tahun 2017 kepenghuluan rantau bais menerima dana sebesar Rp1.789.585.075.- dan pada tahun 2018 menerima dana sebesar Rp2.149.837.837. Yang mana dana tersebut digunakan dalam bidang penyelenggaraan penerintah kepenghuluan, bidang pembangunan dan bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dasar pengakuan yang diterapkan oleh kepenghuluan rantau bais kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir ialah berbasis pada basis kas (cash basic). Hal ini dilihat dari laporan kekayaan milik desa, basis kas artinya seluruh pendapatan dicatat dan dilaporkan setelah uang sudah diterima dan pengeluaran diakui setelah uang sudah benar-benar dikeluarkan.

Proses pengelolaan Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir diawali dari menyusun anggaran yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Setelah anggaran disetujui dan disahkan maka anggaran tersebut sudah bisa dilaksanakan. Sebagai bukti transaksinya, transaksi-transaksi tersebut dicatat kedalam kwitansi dan SPP. Setelah itu bukti-bukti transaksi dicatat kedalam buku kas umum yang berfungsi untuk mencatat segala transaksi pendapatan dan pengeluaran dana. Selanjutnya membuat buku pembantu bank yang mencatat pendapatan dan pengeluaran dana yang berkaitan dengan bank. Selanjutnya, membuat buku pembantu pajak yang

mencatat pendapatan dan pengeluaran dari pajak. Setelah seluruh transaksi dicatat selanjutnya membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang menyajikan realisasi pendapatan, transfer, surplus/defisit dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dipertimbangkan anggarannya dalam satu periode. Jika ingin mengetahui lebih/kurang perhitungan anggaran dapat dilihat dari laporan kekayaan milik desa yang menyajikan informasi posisi keuangan.

Pada laporan kekayaan milik Desa Kepenghuluan Rantau Bais pada tahun 2017 jumlah aset tetap nya adalah Rp716.231.900.00. yaitu gedung dan bangunan Rp239.382.700.00. jalan dan box culvert sebesar Rp466.906.300.00, mobil dan elektronik sebesar Rp9.942.900.00, selanjutnya pada tahun 2018 jumlah aset tetapnya adalah Rp186.622.900.00, yaitu peralatan dan mesin Rp4.723.000.00, gedung dan bangunan Rp85,458,900.00, jalan dan box curvert Rp58.698.000.00, mobiler dan elektronik Rp12.743.000.00.

Berdasarkan pedoman IAI-KASP 2015 Kepenghuluan Rantau Bais dalam laporan keuangannya tidak membuat Buku Besar, Buku Besar Pembantu dan Neraca Lajur.

Selama tahun 2017 dan 2018 Kepenghuluan Rantau Bais telah melakukan belanja untuk persediaan seperti, alat tulis kantor (ATK), Benda pos (materai), alat dan bahan kebersihan, dan penggandaan (foto copy). Pada Tahun 2017 alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp6.325.500.00, benda pos (materai) sebesar Rp2.100.000, alat dan bahan kebersihan sebesar Rp1.194.500.00 dan penggandaan (foto copy) sebesar Rp3.100.000. Pada tahun 2018 alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp9.714.000, benda pos (materai) sebesar Rp4.497.000, alat dan

bahan kebersihan sebesar Rp1.119.000, dan penggandaan (foto copy) sebesar Rp6.200.000. Saat akhir periode nilai akhir persediaan 2017 maupun 2018 disajikan 0 sehingga tidak terlihat nilai persediaan akhirnya pada satu periode.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis terdorong untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dengan judul **Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi di Keenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hlir, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui kesesesuain penerapan akuntansi keuangan kepenghuluan yang diterapkan oleh kepenghuluan rantau bais kecamatan tanah putih.

1.3.2 Manfaat penelitian

- a. Hasil Penelitian ini diterapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang melakukan penelitian mengenai penerapan akuntansi keuangan Kepenghuluan

- b. Bagi kantor Kepenghuluan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan khususnya untuk bagian keuangan atau pengambilan keputusan atau kebijakan untuk menerapkan akuntansi keuangan Kepenghuluan.
- c. Bagi peneliti berikutnya, untuk sebagai bahan perimbangan atau masukan untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembandingan bagi peneliti lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam penelitian dibagi menjadi lima bab ialah :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan atau manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan teori-teori dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

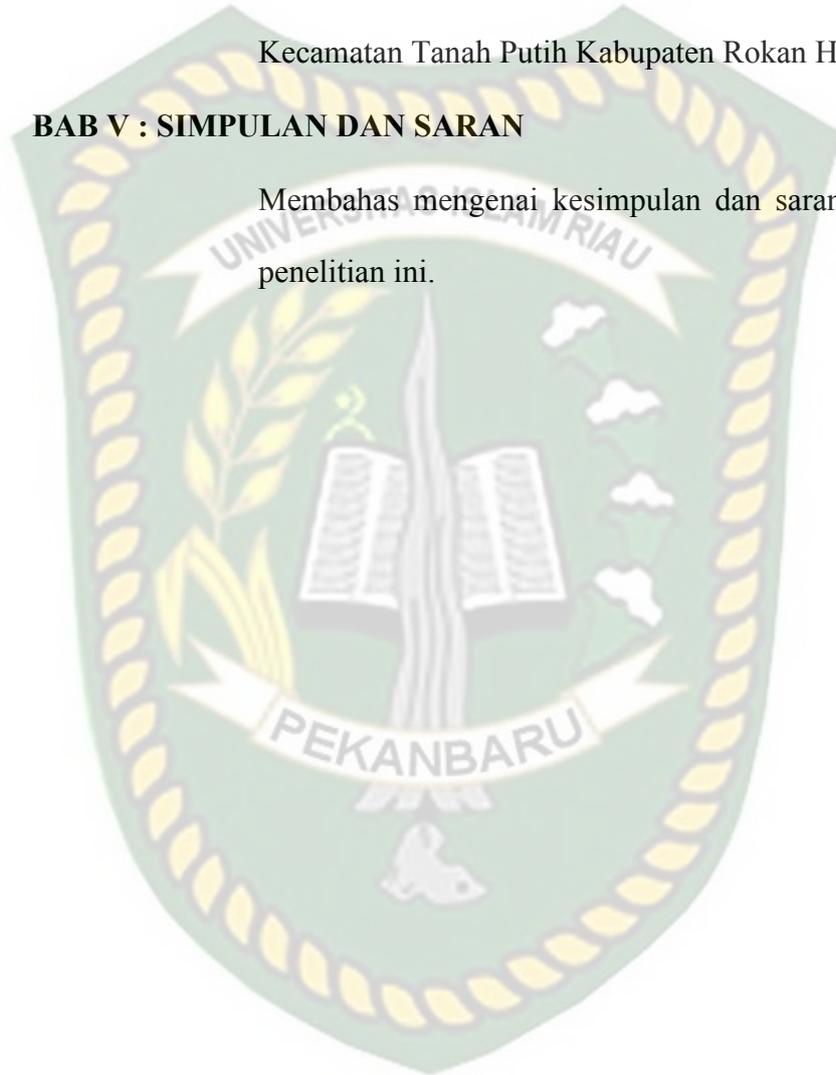
Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang gambaran umum dan Hasil Penelitian Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Akuntansi menurut AAA (American Accounting Association, 1966) merupakan suatu proses, pengidentifikasian, pencatatan transaksi ekonomi dalam suatu entitas yang berguna untuk suatu informasi dan pengambilan keputusan bagi pengguna informasi.

Definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) : akuntansi ialah sebuah seni pencatatan, pengihktisaran, penggolongan dari suatu transaksi-transaksi yang sifatnya keuangan dan dijadikan dalam bentuk laporan keuangan.

Menurut (Suwardjono, 2014: 5). Akuntansi merupakan suatu seni dalam pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Pengertian seni dalam definisi tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa akuntansi bukan merupakan ilmu pengetahuan eksakta atau sains (science) karena dalam proses penalaran dan perancangan akuntansi banyak terlibat unsur pertimbangan (judgment).

Menurut Manurung (2011), akuntansi ialah proses mencatat segala kejadian yang bersifat keuangan atau transaksi dan melaporkannya dalam

bentuk yang lazim disebut laporan keuangan untuk dikomunikasikan kepada para pengguna.

Menurut Kieso, et al. (2016:2), akuntansi merupakan suatu kegiatan pengidentifikasian, pencatatan dan pengkomunikasian suatu peristiwa ekonomi didalam suatu organisasi atau entitas kepada pihak yang berkepentingan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan.

2.1.2 Pengertian Desa

Desa merupakan suatu wilayah permukiman yang terdapat sejumlah orang yang memiliki sistem pemerintahan dan terdapat beberapa kampung yang berada disuatu kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Desa yaitu suatu basis dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, Desa diharapkan tidak hanya dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu membuat pelayanan administrasi desa dengan baik dan dapat mengelola keuangan desa baik dan tertib.

Menurut undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada Bab I pasal 1 yang menerangkan bahwa, Desa adalah desa adat atau dengan nama lainnya. selanjutnya disebut Desa, ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut beberapa para ahli sebagai berikut :

1. Unang Sunardjo

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat yang berdasarkan hukum yang berada disuatu wilayah tertentu yang memiliki kepentingan seperti kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan terdapat susunan pengurus yang di pilih secara bersama dan memiliki hak untuk mengurus rumah tangga sendiri.

2. Rifhi Shiddiq

Desa ialah suatu wilayah yang dihuni oleh sekelompok penduduk yang tingkat kepadatannya rendah dan memiliki mata pencaharian dalam bidang agraris dan dapat berinteraksi terhadap wilayah yang lainnya daerah dan memiliki hubungan timbal balik dengan orang lain.

3. Yuliati

Desa adalah suatu tempat tinggal yang memiliki kesatuan hidup dan kesatuan norma dan memiliki batasan yang jelas.

4. Bambang Utoyo

Desa ialah tempat dimana sebagian besar para penduduk yang bermata pencaharian dibidang tani.

5. I Nyoman Beratha

Desa adalah kesatuan badan hukum atau badan pemerintah yang berada diberada diwilayah kecamatan.

Menurut Undang UU No. 6 Tahun 2014, mengartikan bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik indonesia.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.3 Pengertian Akuntansi Desa

Akuntansi desa merupakan suatu proses pencatatan dari transaksi-transaksi yang terjadi didesa yang berawal dari nota-nota setelah itu dilakukan pencatatan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat menghasilkan satu atau lebih informasi yang dapat digunakan bagi pihak yang berkepentingan disuatu desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Pasal 71 ayat (1) menyebutkan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.1.4 Pengertian Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 Pemerintahan desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Menurut undang- undang no. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

Menurut undang-undang no.6 tahun 2014 pasal 1 ayat (3) pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Menurut Sukrisno Agoes (2014) pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kemudian perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial dan budaya setempat.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Akuntansi

Menurut IAI-KASP (2015 : 7-8) Berikut beberapa prinsip akuntansi yang digunakan :

a. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini memiliki aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua pihak. Harga perolehan ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b. Prinsip Realisasi

Prinsip ini yaitu pembahasan tentang bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh, Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan

pendapatan pada pemerintah desa pada dasarnya dibuat pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diterima.

c. Prinsip Objektif

Prinsip ini mengacu pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang sudah tersedia. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatatan transaksi. prinsip ini harus ada pengawasan dan pengendalian pihak intern tujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk memanipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan seharusnya memberikan sebuah informasi penuh yang tersedia dengan secara kuantitatif dan kualitatif yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

e. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus memiliki nilai konsistensi dalam menggunakan pedoman, metode, dan standar dalam pembuatannya. Dalam laporan keuangan juga harus memiliki nilai banding, maksudnya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama ayudikatif, dan jabatan suprastruktur lainnya. pemerintah yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis dan dapat

diartikan dalam arti dinamis yaitu, berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan.

2.1.6 Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan catatan dan laporan yang di susun untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna bagi manajemen dalam pengelolaan.

Menurut buku Abdul Hamid dan Muhammad Syam Kususfi (2012 : 54-55) sistem akuntansi adalah sebagai berikut :

a. Basis kas (cash basic)

Basis kas, dalam menetapkan transaksi ekonomi boleh dilakukan ketika muncul kesalahan transaksi yang mengakibatkan perubahan kas oleh karena itu transaksi tidak dicatat.

b. Basis Akrua (accrual basic)

Basis akrual adalah transaksi dan peristiwa yang diakui terjadi bukan hanya saat kas diterima dan setara kas diterima, oleh sebab itu peristiwa-peristiwa dan transaksi-transaksi dicatat dan diakui dalam pelaporan keuangan pada saat periode terjadi.

c. Basis Kas Modifikasi (modified cash basis)

Basis kas modifikasi melakukan pencatatan transaksi selama tahun anggaran dan penyesuaian dilakukan pada saat tahun anggaran dan berdasarkan basis akrual.

d. Basis Akrua Modifikasi (modified accrual basis)

Basis akrual modifikasi melakukan pencatatan transaksi menggunakan basis akrual yang dilandasi penggunaannya oleh pertimbangan kepraktisan.

2.1.7 Pengguna Akuntansi

Menurut IAI-KASP (2015 : 6-7) Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, adalah sebagai berikut :

- a. Pihak Internal, merupakan pihak yang berada dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan Seksi.
- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan APBDesa.
- c. Pemerintah, dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil dan bantuan keuangan.
- d. Pihak lain, Selain pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi, pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa adalah lembaga RT/RW, swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

2.1.8 Siklus Akuntansi Desa

Siklus akuntansi desa yang diatur dalam pedoman akuntansi keuangan desa menurut IAI-KASP (2015:12-13) sebagai berikut :

a. Tahap pencatatan

Tahap pencatatan adalah langkah awal dari siklus akuntansi, diawali dari bukti-bukti transaksi setelah itu dilakukan pencatatan ke buku yang sesuai.

b. Tahap penggolongan

Setelah dilakukan pencatatan bukti-bukti transaksi selanjutnya melakukan tahap penggolongan atau tahap pengelompokkan bukti transaksi ke dalam buku besar dan dinilai dalam kelompok debit kredit.

c. Tahap pengikhtisaran

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah membuat neraca saldo dan kertas kerja, laporan kekayaan milik desa yang berisi saldo akhir yang telah dicatat didalam buku besar pembantu. Fungsi Laporan kekayaan milik desa adalah untuk melihat keakuratan atau kejelasan didalam memposting akun ke debit dan kredit harus seimbang atau balance maka perlu pemeriksaan laporan kekayaan milik desa untuk mencegah kesalahn dalam pencatatan.

d. Tahap pelaporan

Tahap ini adalah tahap terakhir dari siklus akuntansi, yang dilakukan dalam tahap ini sebagai berikut:

1. Membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang didalam terdapat realisasi dari pendapatan, belanja, pembiayaan dan anggaran dari pemerintah desa dalam tahun anggaran tertentu.
2. Laporan kekayaan milik desa yang terdapat di dalamnya posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 desember untuk tahun tertentu.

2.1.9 Pencatatan Pada Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut IAI- KASP (2015:13-16) pencatatan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan transaksi pendapatan

Pada bagian ini melakukan pencatatan yaitu pendapatan asli desa yang meliputi pecatatan dari penerimaan pendapatan yang berasal dari hasil aset (swadaya, gotong royong, partisipasi, dan lain-lain) dan berasal dari hasil usaha.

2. Transfer

Pada bagian ini melakukan pencatatan penerimaan pendapatan yang dananya merupakan hasil dari hasil pajak daerah, retribusi daerah/kabupaten, dana desa, alokasi dana desa (ADD), APBD provinsi dan APBD kabupaten.

3. Pendapatan lain-lain

Pada bagian ini dilakukan pencatatan yang penerimaan pendapatan merupakan hasil dari pendapatan sumbangan dan hibah dan pendapatan yang sah dari desa.

4. Pendapatan transaksi belanja

Pada bagian ini dilakukan pencatatan dari belanja penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan atau realisasi pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga yang berasal dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

5. Pencatatan transaksi pembiayaan.

Pada bagian ini dilakukan pencatatan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran), hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, dan pencairan dana. Yang digunakan untuk dana cadangan yang penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala desa.

6. Pencatatan aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintahan desa

Pada bagian ini dilakukan pencatatan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan bersih pemerintah desa pada akhir tahun anggaran per 31 desember.

2.1.10 Karakteristik Akuntansi

Menurut (IAI- KASP 2015: 6) karakteristik akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Penghidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- b. Akuntansi Desa sebagai sebuah sistem dengan input data/informasi dengan output dan laporan keuangan.
- c. Informasi keuangan merupakan suatu entitas.
- d. Pemakai keuangan desa dalam pengambilan keputusan menggunakan informasi yang digunakan.

2.1.11 Pengertian Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa :

Keuangan Desa merupakan hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa”.

Menurut permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Keuangan Desa adalah Semua hal dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Menurut Nurcholif Hanif (2011) Keuangan Desa adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa semua hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang dan segala yang berhubungan dengan seluruh kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

2.1.12 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Asas-asas pengelolaan desa diatur dalam permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, adalah sebagai berikut:

- a. **Transparan**, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
- b. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran, Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

2.1.13 Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Membuat laporan keuangan adalah tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan membuat neraca lajur.

Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan IAI-KASP(2015)

- a. Buku kas umum

Buku kas umum berfungsi untuk mencatat semua transaksi yang bersangkutan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai ataupun secara kredit.

- b. Buku Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

d. Neraca / Kekayaan milik Kepenghuluan

menyajikan posisi keuangan desa dalam satu periode tertentu menggambarkan posisi keuangan desa mengenai aktiva, kewajiban, dan dana pada satu periode.

e. Laporan Realisasi APBDesa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah Laporan Realisasi pelaksanaan APBDesa menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

**Format Lampiran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kepenghuluan**

**Tabel II.1
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEPENGHULUAN
PEMERINTAH KEPENGHULUAN
TAHUN ANGGARAN....**

Kode Rekening				Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	Ket
1				Pendapatan				
1	1			Pendapatan Hasil Kepenghuluan				
1	1	1		Hasil Usaha				
1	1	2		Swadaya, Partisipasi dan gotong-royong				
1	1	3		Lain- lain pendapatan asli yang sah				
1	2			Pendapatan Transfer				
1	2	1		Dana Kepenghuluan				
1	2	2		Bagian dari hasil pajak dan retribusi derah Kabupaten / Kota				
1	2	3		Alokasi Dana Kepenghuluan				
1	2	4		Bantuan Keuangan				
1	2	4	1	Bantuan Provinsi				
1	2	4	2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1	3			Pendapatan lain – lain				
1	3	1		Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1	3	2		Lain- lain pendapatan Kepenghuluan yang sah				
				Jumlah Pendapatan				
2				BELANJA				
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan				
2	1	1		Penghasilan dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai				
				o Penghasilan Tetap Kepala Kepenghuluan dan Perangkat				

				o Tunjangan Kepala Kepenghuluan dan Perangkat				
				o Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				o Alat Tulis Kantor				
				o Benda Pos				
				o Pakaian Dinas / Pakaian Seragam dan Atribut				
				o Pakaian Dinas				
				o Alat dan Bahan Kebersihan				
				o Perjalanan Dinas				
				o Pemeliharaan				
				o Air, Listrik dan Telepon				
				o Honor				
				o Dst				
2	1	2	2	Belanja Modal				
				o Komputer				
				o Meja dan Kursi				
				o Mesin TIK				
				o Dst				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				o Alat Tulis Kantor				
				o Penggandaan				
				o Kosumsi Rapat				
				o Dst				
2	1	4		Operasional RT/RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				o Alat Tulis Kantor				
				o Penggandaan				
				o Kosumsi Rapat				
				o Dst				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				o Upah Kerja				
				o Honor				
				o Dst				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				o Semen				

				o Material				
				o Dst				
2	2	2		Pengaspalan Jalan Kepenghuluan				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				o Upah Kerja				
				o Honor				
				o Dst				
2	2	2	3	Belanja Modal				
				o Aspal				
				o Pasir				
				o Dst				
2	2	3		Kegiatan				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				o Honor Pelatih				
				o Konsumsi				
				o Bahan Pelatihan				
				o Dst				
2	3	2		Kegiatan				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Kepenghuluan dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang Dan Kepenghuluan				
				o Honor				
				o Konsumsi				
				o Bahan Pelatihan				
				o Dst				
2	4	2		Kegiatan				
2	5			Bidang Tak Terduga				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa				
				o Honor Tim				
				o Konsumsi				
				o Obat-Obatan				
				o Dst				
2	5	2		Kegiatan				
				Jumlah Belanja				
				Surplus / Defisit				

3				PEMBIAYAAN				
3	1			Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Kepenghuluan Yang Dipisahkan				
				JUMLAH (RP)				
3	2			Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1		Pembentukan Dana cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Kepenghuluan				
				JUMLAH (RP)				
				o Pembiayaan Neto (Penerimaan Pembiayaan - Pembiayaan Pengeluaran)				
				o SILPA Tahun Berjalan (Selisih Antara Pembiayaan Neto Dengan Hasil Surplus/Defisit)				

TANGGAL.....

TTD

(KEPALA KEPENGHULUAN)

(sumber: IAI-KASP | Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa)

Format Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan

Tabel II.2

**PEMERINTAH KEPENGHULUAN
LAPORAN KEKAYAAN MILIK KEPENGHULUAN
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20..**

Uraian	Tahun n (Tahun Periode Pelaporan)	Tahun n (Tahun Sebelumnya)
Aset Kepenghuluan		
A. Aset Lancar		
1. Kas Kepenghuluan		
a. Uang Kas di Bendahara Kepenghuluan		
b. Rekening Kas Kepenghuluan		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. Dst		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. Dst		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. Aset Tidak Lancar		
1. Investasi Permanen / Penyertaan Modal Pemerintah Kepenghuluan		
2. Aset Tetap		
- Peralatan & Mesin		
- Gedung & Bangunan		
- Jalan, Jaringan, Instalasi, Dst		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset Tidak Lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (1- II)		
-----------------------------------	--	--

TANGGAL.....

TTD

(KEPALA KEPENGHULUAN)

(sumber: IAI-KASP | Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa)

2.2 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan telaah pustaka maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut Penerapan Akuntansi Keuangan Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015 dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tanah Putih, objek dari penelitian ini adalah Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer, merupakan data dan informasi yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara mengenai pencatatan yang dilakukan di kantor Kepenghuluan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang didapat dari kepenghuluan dalam bentuk yang telah jadi tanpa mengalami perubahan. Jenis data sekunder ini terdiri dari data buku kas umum, buku bank desa, buku kas pembantu pajak, laporan realisasi anggaran, laporan kekayaan milik Kepenghuluan, serta anggaran pendapatan dan belanja Kepenghuluan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data diperoleh, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada bendahara mengenai hal-hal yang diteliti meliputi aktivitas Kepenghuluan tanah putih, sejarah berkembangnya Kepenghuluan Tanah Putih. Kebijakan operasional serta kebijakan dibidang akuntansi.
- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengambilan data-data laporan keuangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data, dikelompokkan lalu disusun agar dapat diteliti berdasarkan fakta-fakta yang terlihat yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang disajikan dalam bentuk skripsi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kepenghuluan Rantau Bais adalah suatu wilayah yang sudah ada sejak tahun 1883 yang dipimpin oleh datuk penghulu yang bernama, Nazarudin bin Mungka. Rantau Bais terdiri dari dua kata yaitu Rantau dan Bais, Rantau yang berarti suatu tempat persinggahan pada zaman dahulu dan Bais merupakan suatu tumbuhan marga *Palmea* atau tumbuhan sejenis pinang.

Dirantau Bais tumbuhan ini tumbuh subur bersusun pohon Bais hingga sekarang tetapi sekarang tinggal beberapa pohon saja yang tersisa di sekitar tanah pemakaman. Jumlah penduduk Rantau Bais sebanyak 4.364 jiwa dengan luas wilayah 32,253 Ha dengan menjalani kehidupan mulai dari usaha berladang, berkebun, dan beternak.

Sampai saat ini Kepenghuluan Rantau Bais sudah dipimpin oleh sembilan penghulu.

1. Penghulu Nazarudin
2. Penghulu Abas
3. Penghulu Dagar
4. Penghulu Bakar
5. Penghulu Abdul Razak
6. Penghulu Sutaruddin
7. Penghulu Syafriadi
8. Penghulu Al juflizar
9. Penghulu Yusrikandar, ST

Letak kondisi geografis Kenghuluan Rantau Bais berada di sebelah barat ibukota Kecamatan Tanah Putih jarak dari Kepenghuluan Rantau Bais ke ibu kota Kecamatan sekitar 26 km dan ke ibu kota kabupaten sekitar 80 km. Batas-batas wilayahnya adalah:

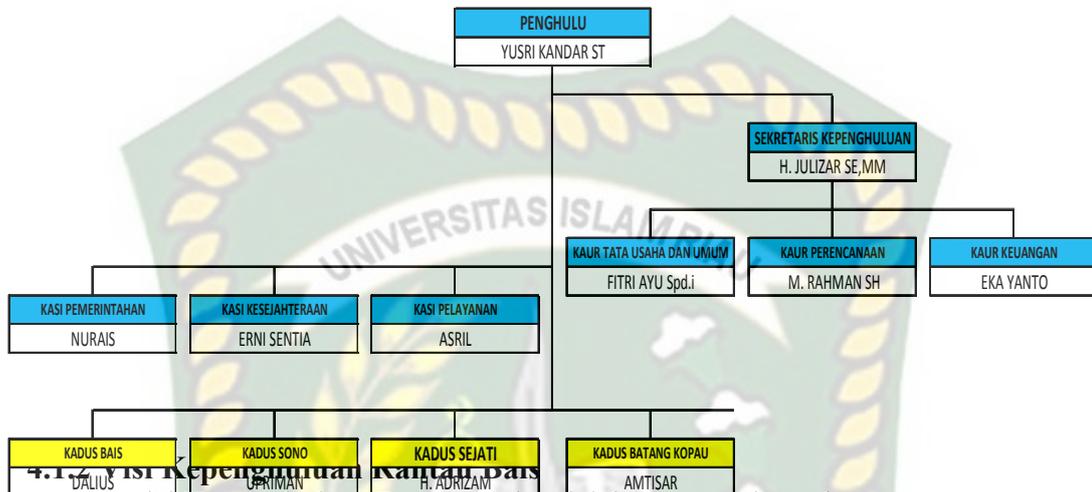
Sebelah utara	: Kepenghuluan Teluk Berembun
Sebelah Timur	: Kepenghuluan Mamugo
Sebelah Selatan	: Kecamatan Mandau
Sebelah Barat	: Kecamatan Teluk Mega

Kepenghuluan Rantau Bais terbagi menjadi 4 Dusun, yaitu dusun Bais, Dusun Sono, Dusun B. Kapau, Dusun Sejati, Kepenghuluan Rantau Bais memiliki sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang terdapat di tiap dusun yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan

sarana umum. Beberapa ruas jalan di Kepenghuluan Rantau Bais sudah beraspal dan semenisasi.

4.1.1 Struktur Organisasi Kepenghuluan Rantau Bais

Gambar IV.1



Visi Kepenghuluan Rantau Bais adalah mengenai gambaran yang diinginkan dimasa akhir periode perencanaan pembangunan Kepenghuluan yang di perkirakan dengan sejumlah sasaran dari hasil pembangunan yang di peroleh dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Kepenghuluan yang merupakan suatu langkah untuk perjalanan pembangunan suatu Kepenghuluan yang mencapai kondisi yang diharapkan. Visi dan Misi Kepenghuluan Ranatau Bais di tetapkan berdasarkan partisipatif, dengan melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan di Kepenghuluan Rantau Bais dan disusun dengan memperhatikan pada pembangunan daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir yaitu **“Terwujudnya Rokan Hilir yang maju dan sejahtera”**. Maka dari itu berdasarkan pertimbangan diatas Visi Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada Periode 2018-2024 adalah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Menuju Masyarakat Madani, Mandiri Maju Dan Sejahtera Serta Berakhlak Mulia”**

4.1.3 Misi Kepenghuluan Rantau Bais

Misi Kepenghuluan Rantau Bais adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh Kepenghuluan dengan berdasarkan Visi Kepenghuluan yang telah ditetapkan agar apa yang diharapkan dan apa yang men jadi tujuan Kepenghuluan dapat berhasil dan tercapai dengan baik. Maka Misi Kepenghuluan Rantau Bais kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir periode 2018-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan cermat kepada masyarakat.
- b. Menciptakan transparansi pelayanan administrasi pemerintah kepada masyarakat.

- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktu yang merata dan seimbang disetiap wilayah Kepenghuluan Rantau Bais.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep), UKM untuk membuka lapangan kerja dan menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja dan program CSR.
- e. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara selalu berkomunikasi dengan instansi terkait dan memantau serta mendatangi setiap pembantu kesehatan (POSYANDU) maupun PUSKESMAS yang ada di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pada Bab II dan Peninjauan Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terhadap Akuntansi Berterima Umum. Jadi pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana kesesuaian penerapan Akuntansi Keuangan Rantau Bais berdasarkan prinsip Akuntansi yang Berterima umum.

4.2.1 Dasar pencatatan

Dasar pengakuan yang diterapkan oleh Kepenghuluan Rantau Bais adalah Basis kas (cash basis) yaitu pendapatan dicatat dan dilaporkan pada saat uang sudah diterima dan sebaliknya pengeluaran akan dicatat pada saat uang sudah dikeluarkan. Jadi Kepenghuluan Rantau Bais melakukan pencatatan dengan menggunakan buku tunggal (*single entry*). Sistem pencatatan ini hanya dilakukan kolom penerimaan dan sebaliknya seluruh transaksi yang mengurangi saldi kas Kepenghuluan akan dicatat kedalam kolom pengeluaran.

4.2.2 Siklus Akuntansi

Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Rantau Bais diawali dari mencatat bukti-bukti transaksi kedalam buku kas umum-tunai (Lampiran 1), buku pembantu pajak (Lampiran 2), dan buku bank (Lampiran 3). Setelah semua transaksi sudah dicatat selanjutnya menyusun Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Kepenghuluan (Lampiran 4), selanjutnya membuat Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan (Lampiran 5).

a. Tahap pencatatan

Tahap pencatatan merupakan langkah awal dari siklus akuntansi berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dicatat kedalam buku yang sesuai. Seluruh pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dicatat kedalam buku kas umum-tunai.

Buku Kas Umum

1 Desember 2017	Menerima pendapatan transfer dana kepenghuluan sebesar Rp 47.701.827
4 Desember 2017	pembayaran cetak poto pilpeng sebesar Rp 250.000
4 Desember 2017	Pembayaran transportasi MPA sebesar Rp 500.000
20 Desember 2017	pembayaran minyak mesin MPA sebesar Rp 600.000
29 Desember 2017	pembayaran Honor guru Paud sebesar Rp 1.800.000
29 Desember 2017	pembayaran penghasilan tetap penghulu dan perangkat kepenghuluan sebesar Rp 44.500.000

Tabel IV.2

Buku Kas Umum Kepenghuluan Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Bulan Desember Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3	4	5	6
1	1-12-2017		Kas di bendahara	47.700.000	
2	4-12-2017		Pembayaran Cetak Poto Pilpeng		250.000
3	29-12-2017		Pembayaran Transportasi MPA		1.600.000
4	29-12-2017		Pembayaran Minyak Mesin MPA		6.000.000
5	29-12-2017		Pembayaran Honor Guru PAUD 2017		1.800.000
6	29-12-2017		Pembayaran Penghasilan Tetap Penghulu dan Perangkat		44.550.000

Sumber: Buku Kas Umum Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan hilir

Berdasarkan dari Tabel diatas Buku Kas Umum Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Pedoman Asistensi Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (KASP-2015) dan sudah sesuai dengan Permendagri (Peraturan Menteri dalam Negeri) No. 113 Tahun 2014.

Buku Pembantu Pajak

Untuk mencatat transaksi-transaksi dari potongan pajak dan pemungutan Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih yang dilakukan oleh bendahara Kepenghuluan yang dipergunakan untuk mencatat atas penyeteroran pajak ke kas negara berdasarkan dengan Undang-undang. Pembayaran yang dilakukan desa dikenakan pajak tergantung dari besarnya pembayaran yang dilakukan, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan pph pasal 22 yang dikenakan untuk transaksi belanja kepenghuluan. Untuk Pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan jika total belanja kurang dari Rp2.000.000. Jika transaksi belanja melebihi Rp2.000.000 maka Kepenghuluan dikenakan pajak Penghasilan (PPN) dan pph pasal 22.

Contoh transaksi belanja Kepenghuluan Rantau Bais:

- 4-12-2017 Kepenghuluan Rantau Bais membeli bahan untuk pembuatan bilik suara sebesar Rp1.805.000. Dari transaksi ini dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp164.090.
- 29-12-2017 Kepenghuluan Rantau Bais melakukan pemasangan Wifi kantor sebesar Rp9.942.900. Dari transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp903.900 dan pph pasal 22 sebesar Rp135.585
- 29-12-2017 Kepenghuluan Rantau Bais membeli semen, besi, kawat, beton, paku cat air untuk jalan semenisasi sebesar Rp38.385.000. Dari transaksi ini dikenakan PPN sebesar Rp3.489.545 dan pph pasal 22 sebesar Rp523.431.

Tabel dibawah ini penyajian transaksi-transaksi dalam buku Kas Pembantu Pajak sebagai berikut:

Tabel IV.3
Buku Kas Pembantu Pajak
Kepenghuluan Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan hilir
Bulan Desember Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	4-12-2017	Belanja Bahan Pembuatan Bilik			
		Potongan Pajak PPN	164.090	0	164.090
2	29-12-2017	Pemasangan Wifi Kantor			
		Potongan Pajak PPN	903.900	0	1.067.909
		Potongan PPH Pasal 22	135.585	0	1.203.575
3	29-12-2017	Belanja semen, besi, kawat, beton, paku cat air			
		Potongan Pajak PPN	3.489.545	0	4.693.120
		Potongan PPH Pasal 22	523.431	0	5.216.551

Sumber :Buku Kas Pembantu Pajak Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Tabel diatas, buku kas pembantu pajak yang dibuat oleh Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2013 dan Pedoman Asistensi Keuangan Akuntansi Sektor Publik (KASP-2015).

Buku Bank Kepenghuluan

Berikut transaksi-transaksi Buku Bank Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih sebagai berikut:

- 05- 06-2017 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih menerima dana Kepenghuluan tahap 1 sebesar Rp502.486.200
- 07-06-2017 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih melakukan penarikan dana DK dan SILVA 2017 Rp208.877.000

- 07-06-2017 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih melakukan penarikan Dana DK sebesar Rp71.869.900
- 19-06-2017 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih melakukan penarikan Dana DK sebesar Rp209.748.700
- 30-06-2017 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih melakukan alokasi dana Kepenghuluan sebesar Rp91.050.000

Dibawah ini penyajian Tabel transaksi-transaksi Buku Bank Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih sebagai berikut:

Tabel IV.4
Buku Bank
Kepenghuluan Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan hilir
Bulan Juni Tahun Anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian	No. Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo (Rp)
				Setoran (Rp)	Bunga (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	Biaya Admin (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05-06-2017	Penerimaan Dana Desa Tahap I Tahun 2017		502.486.200					502.486.200
2	07-06-2017	Penarikan Tunai				208.877.000			208.877.000
3	07-06-2017	Penarikan Dana DK				71.869.900			71.869.900
4	19-06-2017	Penarikan Dana DK				209.748.700			209.748.700

Sumber :Buku Kas Pembantu Pajak Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan Permendagri No 113 tahun 2013 dan Pedoman Asistensi Keuangan Akuntansi Sektor Publik (KASP-2015), dilihat dari tabel Buku Bank Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih diatas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Tahap Penggolongan

Setelah melakukan pencatatan data yang berdasarkan bukti transaksi melalui kwitansi/Nota selanjutnya melakukan penggolongan agar dapat memudahkan untuk menganalisis data. Dengan mengelompokkan bukti transaksi kedalam buku besar berdasarkan nama akun dan dicatat berdasarkan kelompok debit dan kredit. Di Kepenghuluan Rantau Bais sistem pencatatannya masih menggunakan *cash basis dan single entry* maka dari itu Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih belum membuat Buku besar dan Buku Besar Pembantu yang seharusnya pada buku kas melakukan pencatatan semua transaksi lalu dicatat kedalam buku besar dan buku besar pembantu.

Berikut dibawah ini format yang harus dibuat oleh Kepenghuluan Rantau Bais sebagai berikut :

Tabel IV.5
Buku Besar

Nama Akun: Kas di Bendahara

Tanggal	Ket	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
1-12-2017	Kas Bendahara Kepenghuluan		47.700.000		47.700.000	
4-12-2017	Cetak Poto Pilpeng			250.000	47.450.000	
29-12-2017	Transportasi MPA			500.000	46.950.000	
29-12-2017	Minyak Mesin MPA			600.000	46.350.000	
29-12-2017	Honor Guru PAUD			1.800.000	44.550.000	
29-12-2017	Penghasilan Tetap Penghulu Dan Perangkat Desa			44.450.000		

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

Tabel IV.6
Buku Besar

Nama Akun: Pendapatan Transfer

Tanggal	Ket	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
1-12-2017	Penerimaan Dana Kepenghuluan			47.700.000		47.700.000

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

Tabel IV.7
Buku Besar Pembantu

Nama Akun : Alokasi Dana Kepenghuluan

Tanggal	Ket	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
1-12-2017	Transfer Dana Kepenghuluan			47.700.000		47.700.000

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

Tabel IV.8
Buku Besar

Nama Akun: Belanja Operasional Kantor

Tanggal	Ket	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
4-12-2017	Cetak Poto Pilpeng		250.000		250.000	

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

Tabel IV.9
Buku Besar

Nama Akun: Belanja MPA (Masyarakat Peduli Api)

Tanggal	Ket	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
29-12-2017	Transportasi MPA		500.000		500.000	
29-12-2017	Minyak Mesin MPA		600.000		600.000	

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

Tabel IV.10
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Pembinaan Masyarakat

Tanggal	Ket	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
29-12-2017	Jasa Guru PAUD		1.800.000		1.800.000	

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

Tabel IV.11
Buku Besar

Nama Akun : Belanja Pegawai

Tanggal	Ket	R e f	Debit	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
29-12-2017	Penghasilan Tetap Kepala Kepenghuluan dan Perangkat Kepenghuluan		44.550.000		44.550.000	

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

c. Tahap Pengikhtisaran

Setelah semua transaksi telah diposting kedalam buku besar, selanjutnya yaitu membuat Neraca Saldo. Yang tujuannya dilakukan agar dapat meyakinkan bahwa pencatatan dibuat dengan benar atau debit dan kredit nya telah seimbang. Berikut dibawah ini format Neraca Saldo berdasarkan IAI-KASP 2015 yang disusun oleh Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih sebagai berikut:

Tabel IV.12
Neraca Saldo (Sebagian)
Tahun Anggaran 2017

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Bendahara Kepenghuluan		
Dana Kepenghuluan		47.700.000
Belanja Bidang Penyelenggaraan Keuangan		

Kepenghuluan		
a. Penghasilan tetap Kepala Kepenghuluan dan Perangkat Kepenghuluan	44.450.000	
b. Insentif Guru PAUD	1.800.000	
c. Kegiatan MPA(Masyarakat Peduli Api)	1.100.000	
d. Operasional Perkantoran	250.000	

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

d. Tahap Penyesuaian

Tahap penyesuaian bertujuan untuk menyajikan secara wajar jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Kepenghuluan dengan menghitung jumlah persediaan dan aset tetap.

1. Persediaan

Persediaan atau Bahan habis pakai yang dapat digunakan dalam waktu yang tidak singkat yang digunakan untuk kegiatan Operasional setiap hari. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tidak menghitung nilai perolehan persediaan (disajikan 0) pada Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan yaitu seperti (Materai, ATK, Benda Pos) sehingga tidak terlihat jumlah saldo persediaan yang tersisa. Agar dapat melihat nilai akun persediaan yang sebenarnya Kepenghuluan Rantau Bais harus melakukan perhitungan terhadap sisa bahan habis pakai agar dapat menambah nilai ekuitas kekayaan bersih.

2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berupa Tanah, peralatan dan mesin, jalan jaringan instalasi, gedung dan bangunan yang dimiliki Kepenghuluan dengan masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun.

Pada Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan dalam kolom Aset tetap nya hanya menyajikan nilai perolehan aset tetap tidak mengurangi dengan akumulasi penyusutan (tidak menyajikan akumulasi penyusutan). Pada Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan Rantau Bais tahun 2017 jumlah aset tetap nya adalah Rp716.231.900.00. yaitu gedung dan bangunan Rp239.382.700.00. jalan dan box culvert sebesar Rp466.906.300.00, mobil dan elektronik sebesar Rp9.942.900.00, selanjutnya pada tahun 2018 jumlah aset tetapnya adalah Rp186.622.900.00, yaitu peralatan dan mesin Rp4.723.000.00, gedung dan bangunan Rp85,458,900.00, jalan dan box curvert Rp58.698.000.00, mobiler dan elektronik Rp12.743.000.00. Untuk Peralatan dan mesin umur ekonomis ditaksir sekitar 5 tahun sedangkan jalan jaringan dan irigasi ditaksir umur ekonomisnya 20 tahun. Jadi dapat dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sebagai berikut:

A. Peralatan dan Mesin

Perhitungan penyusutan untuk satu tahun yang di lakukan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih.

Nilai Perolehan : Rp4.723.000

Umur ekonomis: 5 tahun

Penyusutan = 4.723.000 : 5 tahun = 944.600/per tahun

B. Jalan dan box curvert

Nilai Perolehan : Rp466.906.300.

Umur ekonomis: 20 tahun

Penyusutan = 466.906.300.00 : 20 tahun = 23.345.315/pertahun

C. Jalan dan box curvert

Nilai perolehan : 58.698.000.

Umur ekonomis: 20 tahun

Penyusutan = 58.698.000 : 20 tahun = 2.934.900/pertahun

Jadi perhitungan diatas adalah pencatatan yang seharusnya dilakukan oleh Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

e. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan adalah tahap membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APBkep dan Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan yang merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi yang diambil dari data laporan keuangan dari seluruh kegiatan transaksi.

1. Tahap Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKep

Laporan Realisasi merupakan laporan yang menyajikan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Surplus/Defisit, dan Sisa/lebih anggaran selama periode pelaporan yang berdasarkan dengan anggaran yang telah ditetapkan

Tabel IV.13
Laporan Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan
Pemerintah Kepenghuluan Rantau Bais Kec. Tanah Putih
Kab. Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2017

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	1.104.585.075	1.104.359.900	694.335.175
1.1	Pendapatan Asli Kepenghuluan	-	-	-
1.1.1	Hasil Usaha	-	-	-
1.1.2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	-
1.2.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-	-	-
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.104.585.075	1.104.359.900	694.335.175
1.2.1	Dana Kepenghuluan	833.629.000	817.206.000	16.423.000
1	Alokasi Dana Kepenghuluan	666.060.856	156.315.000	509.745.856
1.2.3		298.895.219	130.638.900	168.256.319
	Jumlah Pendapatan	1.104.585.075	1.104.359.900	694.335.175
	BELANJA			

2	Bidang Penyelenggaraan Kepenghuluan	578.986.900	263.036.572	315.950.328
2.1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	78.042.295	21.290.000	56.752.295
2.3	Bidang Pemberdayaan Kepenghuluan	155.140.000	121.717.000	33.423.000
2.4	Jumlah Belanja	1.104.585.075	1.104.359.900	694.335.175
	Surplus/ (Defisit)	-703.992.620	7.972.672	90.000
	Sisa Anggaran	693.998.658	7.972.672	694.088.658
	PEMBIAYAAN	9.993.962	-	9.993.962
3	Penerimaan Pembiayaan	9.993.962	-	9.993.962
3.1	SILPA	9.993.962	-	9.993.962

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

2. Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan

Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan adalah kekayaan yang dimiliki Kepenghuluan yang meliputi aset tidak lancar, aset lancar dan kewajiban Kepenghuluan selama periode tertentu. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Belum sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 dan belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Hal tersebut disebabkan Kepenghuluan Rantau Bais pada Laporan Kekayaan Kepenghuluan tidak menyajikan perhitungan penyusutan aset tetap. Berikut dibawah ini format Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan yang seharusnya dilakukan oleh Kepenghuluan Rantau Bais.

Tabel IV.14
Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan
Sampai dengan 31 Desember 2017

Uraian	Tahun 2017 (Rp)		Tahun 2016 (Rp)
1. Aset Kepenghuluan			
A. Aset Lancar			
1. Kas Kepenghuluan			
a. Uang Kas di Bendahara Kepenghuluan		2.697.472	68.734
b. Rekening Kas Kepenghuluan		15.686.828	9.925.228
2. Piutang			
a. Piutang Sewa Tanah	-	-	-
b. Piutang Sewa Gedung	-	-	-
3. Persediaan			
a. Kertas Segel	-	-	-
b. Materai	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR		18.384.300	9.993.962
B. Aset Tidak Lancar			

1. Investasi Permanen			
- Penyertaan Modal Pemerintah Kepenghuluan	-	-	-
2. Aset Tetap			
- Tanah	-	-	-
- Peralatan dan Mesin			4.558.000
- Gedung & Bangunan	239.382.700	227.413.565	146.279.785
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	(11.969.135)		
- Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan & Instalasi	466.906.300	443.560.985	466.906.300
3. Dana Cadangan	(23.345.315)		
- Dana Cadangan			146.735.200
4. Aset Tidak Lancar Lainnya	9.942.900		32.384.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR			
JUMLAH ASET (A+B)			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		670.974.550	796.836.285
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I – II)		689.358.858	806.857.247

Sumber: hasil pengolahan data penulis tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, sebelum dilakukannya penyusutan Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan Rantau Bais sebesar Rp734.616.200 tetapi setelah aset tetap yaitu gedung dan bangunan, jalan dan box curvert pada Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan Rantau Bais dilakukan penyusutan menjadi sebesar Rp689.358.858.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab dan uraian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu penulis akan membuat suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat adalah sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

- a. Dasar pengakuan yang digunakan Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah *cash basis*, yang mana dilakukan pencatatan pada saat pendapatan akan dicatat apabila uang sudah benar diterima dan pengeluaran dicatat pada saat uang telah benar dikeluarkan.
- b. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir proses akuntansinya telah menggunakan Permendagri No 113 tahun 2014 tetapi pada IAI KASP (2015) Kepenghuluan Rantau Bais belum sepenuhnya mengikuti atau menerapkannya.
- c. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan IAI KASP (2015) belum membuat Buku Besar, Buku Besar Pembantu dan Neraca Saldo.
- d. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan pada persediaan bahan habis pakai nya tidak dihitung.
- e. Penerapan Akuntansi pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih belum sesuai dengan Akuntan Berterima Umum.

5.2 Saran

- a. Untuk mencatat dengan baik seharusnya Kepenghuluan Rantau bais menggunakan sistem pencatatan *Double Entry (berpasangan)* yang mana seluruh transaksi dicatat dikolom Debit dan Kredit.
- b. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seharusnya menggunakan dasar pengakuan *accrual basis* yang mana transaksi dicatat dan diakui tanpa melihat kas sudah diterima atau sudah dikeluarkan,
- c. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir siklus akuntansi yang disajikan seharusnya dimulai dari membuat jurnal umum, lalu memposting ke Buku Besar dan Buku besar pembantu , selanjutnya membuat Neraca Saldo, membuat Jurnal Penyesuaian, lalu menyusun laporan keuangan.
- d. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir untuk membuat Laporan Keuangan seharusnya Berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia yang berpedoman pada Asistensi Akuntan Keuangan Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI KASP-2015).
- e. Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Pada Laporan Kekayaan Milik Kepenghuluan seharusnya membuat perhitungan pada persediaan bahan habis pakai dan akumulasi penyusutan bertujuan agar tidak salah dalam menyajikan Laporan dan agar disajikan secara akurat dan wajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estaralita Trisnawati. 2014. Akuntansi Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra 2015. Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta : BPKP
- Halim, Abdul & Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta : Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta : Dewan Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kieso, et al. 2016. Pengantar Akuntansi. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat
- Lubis, Arfan. 2010. Akuntansi Keperilakuan. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta : Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Skripsi Noveriza Enggan. 2019. Analisis Penerepan Akuntansi Pada Kepenghuluk Teluk Mega di Kamatan Tanah Putih. Skripsi Program Akuntansi.
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Dana Desa. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Suwardjono. 2014. Teori Akuntansi. Edisis Ketiga. Yogyakarta : BPF
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaga Negara Republik Indonesia.